IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LOMBA KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA MEDAN TAHUN 2025 DI KELURAHAN TELADAN BARAT KECAMATAN MEDAN KOTA

Alisya Nabilah Nasution
NPP. 33.0056
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: alisyanabilah50@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Riyan Jaelani, S.STP, M.Tr.IP
Email: Riyanjaelani@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *The implementation of the Outstanding Village Competition policy based on Minister of Home Affairs Regulation Number 81 of 2015 often encounters field challenges, including rigid bureaucratic standard operating procedures, lack of optimal implementation or integration, and temporary innovations that only emerge during competitive events. However, Teladan Barat Village in Medan Kota District bucked this trend by winning First Place in the Outstanding Village Competition at the Medan City level and Second Place at the North Sumatra Provincial level in 2025, which calls for an academic exploration regarding its successful policy implementation.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze and describe the policy implementation of the Outstanding Village Competition at the Medan City level in 2025 within Teladan Barat Village, Medan Kota District.* ***Method:*** *This research utilized a descriptive qualitative approach with a case study design. Data collection was carried out through structured interviews, structured observation, and documentation study. Data analysis was executed using Miles et al. (2014) interactive model, comprising data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing.* ***Result:*** *Communication was systematically delivered through vertical hierarchical channels, routine coordination meetings, and WhatsApp groups. Resources were solid, supported by 8 civil servants with bachelor degrees, 13 persistent neighborhood head innovations, and the Tebarsidig digital application. Bureaucracy functioned effectively via clear standard operating procedures and integrated coordination with 19 local government agencies as the assessment team. The disposition of the implementers was highly proactive and sustainable, meaning that local innovations and community public services were built as part of an institutional culture rather than just an instantaneous response to the competition.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the implementation of the Outstanding Village Competition policy in Teladan Barat Village was highly effective.*
Keywords: *Good Governance; Outstanding Village Competition; Policy Implementation.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Implementasi kebijakan Lomba Kelurahan Berprestasi berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 kerap kali terhambat oleh masalah koordinasi yang lemah, minimnya kompetensi aparatur, serta munculnya inovasi instan yang hanya bersifat sementara selama masa penilaian. Namun, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota justru berhasil meraih Juara I tingkat Kota Medan dan Juara II tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, sehingga menjadi anomali akademis yang layak diteliti lebih lanjut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Lomba Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Medan Tahun 2025 di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi terstruktur, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Komunikasi tersampaikan secara hierarkis melalui rapat koordinasi berjenjang dan grup WhatsApp. Sumber daya didukung oleh 8 ASN berpendidikan S1, 13 inovasi Kepala Lingkungan yang berkelanjutan, dan aplikasi digital Tebarsidig. Birokrasi berjalan proporsional dengan kepatuhan terhadap SOP formal dan koordinasi bersama 19 OPD tim penilai. Disposisi implementor bersifat proaktif dan berkelanjutan di mana inovasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sebagai agenda kerja rutin kelembagaan, bukan sekadar respons instan terhadap perlombaan. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Lomba Kelurahan Berprestasi di Kelurahan Teladan Barat telah berjalan sangat efektif dan optimal.

Kata Kunci: *Good Governance*; Implementasi Kebijakan; Lomba Kelurahan Berprestasi.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Lomba Kelurahan Berprestasi merupakan operasionalisasi nyata dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Kebijakan ini dirancang bukan sekadar sebagai ajang seremonial tahunan, melainkan sebagai instrumen evaluatif komprehensif untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan di tingkat akar rumput. Namun, realitas empiris di berbagai daerah sering kali menunjukkan potret sebaliknya; implementasi kebijakan ini kerap kali terhambat oleh masalah koordinasi yang lemah, minimnya kompetensi personel aparatur, serta kecenderungan munculnya inovasi instan yang hanya bertahan selama masa penilaian berlangsung (Melinda, 2021). Keberhasilan Kelurahan Teladan Barat membuktikan bahwa tingginya kapasitas tata kelola kelembagaan di tingkat lokal berkorelasi langsung terhadap optimalnya kualitas penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat luas (Anggito & Setiawan, 2018).

Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, menorehkan capaian luar biasa dengan meraih predikat Juara I Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Medan sekaligus Juara II Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025. Prestasi ini menjadi anomali akademis yang sangat menarik untuk diteliti secara ilmiah, terutama di tengah berbagai hambatan implementasi kebijakan serupa di daerah lain (Maharaksa et al., 2025). Evaluasi terhadap perkembangan dan keberhasilan suatu wilayah menuntut adanya penguatan akuntabilitas tata kelola internal serta keterlibatan aktif dari kelembagaan masyarakat (Masbiran et al., 2021).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada kesenjangan antara idealitas implementasi Lomba Kelurahan Berprestasi yang seharusnya mendorong tata kelola berkelanjutan dengan realitas lapangan di mana banyak

kelurahan hanya menghasilkan inovasi sementara semata. Kajian akademis mengenai evaluasi perkembangan desa dan kelurahan di Indonesia sesungguhnya telah cukup berkembang. Berbagai penelitian telah membahas aspek-aspek seperti indeks desa membangun (IDM), evaluasi perkembangan desa berbasis Permendagri, serta mekanisme kompetisi antar-desa sebagai instrumen pembangunan. Namun, terdapat beberapa celah penelitian yang secara kumulatif membentuk kesenjangan signifikan dalam literatur yang ada.

Sebagian besar studi berfokus pada konteks desa (*rural*), bukan kelurahan (*urban/peri-urban*). Padahal kelurahan memiliki karakteristik kelembagaan yang berbeda secara struktural: berstatus perangkat daerah, dipimpin oleh lurah sebagai aparatur sipil negara (bukan kepala desa yang dipilih masyarakat), serta tidak memiliki kewenangan anggaran mandiri seperti yang dimiliki desa berdasarkan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Perbedaan fundamental ini membuat temuan dari studi berbasis desa tidak dapat diterapkan begitu saja ke dalam konteks kelurahan.

Penelitian yang ada umumnya mengkaji implementasi kebijakan evaluasi kelurahan secara agregat dan makro, tanpa mendalami faktor-faktor internal kelembagaan yang membedakan kelurahan dengan kapasitas tata kelola tinggi dari kelurahan yang hanya menghasilkan inovasi semu. Dimensi seperti kepemimpinan transformasional lurah, budaya organisasi kelurahan, jaringan kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan, serta kapasitas adaptif aparatur masih kurang mendapat perhatian dalam studi-studi yang ada. Belum banyak penelitian yang secara eksplisit mengkaji dinamika implementasi Lomba Kelurahan Berprestasi dalam konteks kelurahan yang dikategorikan memiliki *track record* inovasi berkelanjutan — yakni kelurahan yang tidak hanya menang dalam kompetisi, tetapi juga mampu mempertahankan dan mengembangkan inovasinya pasca-perlombaan. Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, merupakan salah satu contoh kasus yang relevan dan representatif untuk mengisi kekosongan ini.

Keterbatasan studi yang secara spesifik menempatkan Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia dengan kompleksitas urban yang tinggi — sebagai lokus penelitian implementasi kebijakan kompetisi kelurahan. Konteks perkotaan Medan dengan heterogenitas sosial-budaya, kepadatan penduduk, dan intensitas interaksi kelembagaannya menghadirkan dinamika implementasi yang berbeda dibandingkan kota-kota lain yang lebih homogen.

Berdasarkan pemetaan kesenjangan di atas, penelitian ini memosisikan diri sebagai studi kasus implementasi kebijakan pada level mikro-kelembagaan (*street-level implementation*) yang berfokus pada kelurahan dengan kapasitas tata kelola unggul. Dengan mengambil objek penelitian Kelurahan Teladan Barat — yang dianggap representatif sebagai kelurahan berprestasi di Kota Medan — penelitian ini berupaya mengungkap *how* dan *why* suatu kelurahan mampu mengimplementasikan kebijakan Lomba Kelurahan Berprestasi secara optimal, tidak sekadar mengikuti prosedur formal, tetapi menjadikannya sebagai momentum penguatan tata kelola yang berkelanjutan. Dengan demikian, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana implementasi kebijakan Lomba Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Medan Tahun 2025 di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota?"

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan mengingat perlunya memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan Lomba Kelurahan Berprestasi di Kelurahan Teladan Barat sebagai dasar perumusan strategi oleh pemerintah kota dan kelurahan lain dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami pola keberhasilan implementasi kebijakan evaluasi perkembangan wilayah secara faktual, sehingga upaya replikasi inovasi tata kelola yang baik berisiko tidak tepat sasaran dan tidak efektif. Akibatnya, peningkatan kualitas kelurahan-kelurahan lain dapat berjalan kurang optimal karena tidak didukung oleh data yang memadai untuk perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap implementasi kebijakan publik di tingkat kelurahan telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Beberapa variabel krusial seperti kapasitas aparatur, disposisi, dan struktur birokrasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi program sosial. Sururi et al. (2023) dalam karya teori dan praktis implementasi kebijakan publik menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh keselarasan antara kapasitas aparatur dan struktur organisasional.

Melinda (2021)secara khusus mengkaji implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 dan menemukan bahwa penyelenggaraan evaluasi perkembangan kelurahan masih menghadapi kendala teknis berupa minimnya kapasitas SDM dan ketidakkonsistenan SOP. Temuan ini sejalan dengan (Setiawan et al., 2022) yang menemukan bahwa kapasitas pemerintah daerah berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik di Indonesia pascadesentralisasi. Secara spesifik, keberhasilan Kelurahan Teladan Barat membuktikan bahwa tingginya kapasitas tata kelola kelembagaan di tingkat lokal berkorelasi langsung terhadap optimalnya kualitas penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat luas (Setiawan et al., 2022)

Relevan dengan aspek prosedural, Handayani et al. (2021) meneliti implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dan menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap SOP merupakan faktor penentu utama kelancaran implementasi. Kepatuhan aparatur terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) formal menjadi instrumen determinan dalam menjamin kelancaran implementasi kebijakan pelayanan terpadu di tingkat kewilayahan (Handayani et al., 2021). Di sisi lain, Maharaksa et al. (2025) menganalisis kompleksitas implementasi kebijakan publik di Indonesia dan menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam mengatasi hambatan implementasi.

Dimensi digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan juga menjadi perhatian peneliti. Riswati (2021) menelaah transformasi tata kelola pemerintahan daerah berbasis pemanfaatan teknologi informasi demi mewujudkan efisiensi birokrasi di era modern. Penerapan aplikasi digital seperti ‘Tebarsidig’ di lokus penelitian mencerminkan peta jalan tersebut, selaras dengan gagasan bahwa inovasi digital merupakan instrumen strategis pembaruan layanan publik (Riswati, 2021). Lebih lanjut, Djatmiko et al. (2025) menegaskan bahwa transformasi digital melalui inovasi pelayanan publik di tingkat kelurahan harus mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat guna menciptakan tata kelola pemerintahan berkelanjutan yang inklusif. Dengan demikian, inklusi sosial menjadi syarat mutlak agar manfaat digitalisasi tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok saja.

Dari perspektif akuntabilitas dan partisipasi, evaluasi terhadap perkembangan dan keberhasilan suatu wilayah menuntut adanya penguatan akuntabilitas tata kelola internal serta keterlibatan aktif dari kelembagaan masyarakat (Masbiran et al., 2021). Partisipasi komunitas merupakan pilar keberhasilan program wilayah, sebagaimana ditegaskan oleh Syamsiyah et al. (2025) bahwa pendekatan partisipatif dari komunitas lokal dan kader lingkungan menjadi pilar fundamental dalam menjaga keberlangsungan program pembangunan wilayah yang sadar lingkungan.

Penilaian aspek kewilayahan dalam program lomba kelurahan berprestasi pun tidak terlepas dari dimensi kesehatan lingkungan. Subarno et al. (2025) menemukan bahwa penilaian aspek kewilayahan dalam lomba kelurahan berprestasi juga mencakup kemampuan integrasi program kesehatan lingkungan ke dalam strategi penguatan ketahanan komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria penilaian lomba kelurahan semakin komprehensif dengan memasukkan indikator lingkungan hidup dan ketahanan ekologis sebagai bagian dari pembangunan wilayah. Temuan ini memperkuat argumen bahwa inovasi tidak selalu harus bersumber dari atas (top-down), melainkan dapat lahir dari inisiatif lokal yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

Secara keseluruhan, berbagai penelitian di atas menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat kelurahan merupakan hasil dari sinergi multidimensi: kapasitas aparatur yang memadai, kepatuhan prosedural, digitalisasi yang inklusif, akuntabilitas yang terukur, partisipasi masyarakat yang aktif, serta inovasi lokal yang berkelanjutan. Kajian-kajian tersebut menjadi landasan

teoretis sekaligus empiris bagi penelitian ini dalam menganalisis implementasi program Kelurahan Berprestasi di Kelurahan Teladan Barat, Kota Medan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu karena merupakan kajian baru dilihat dari segi konteks objek penelitian, yakni mengkaji secara spesifik keberhasilan implementasi kebijakan Lomba Kelurahan Berprestasi di kelurahan pemenang tingkat kota dan provinsi yang memiliki inovasi tata kelola berkelanjutan. Kebaruan juga terletak pada penggunaan model Edwards III sebagaimana yang dikutip dalam Sururi et al. (2023) untuk membedah secara komprehensif empat variabel implementasi (komunikasi, sumber daya, birokrasi, dan disposisi) dalam konteks kompetisi kelurahan yang selama ini belum banyak diteliti secara mendalam. Selain itu, temuan mengenai aplikasi digital "Tebarsidig" dan 13 inovasi Kepala Lingkungan sebagai wujud kapasitas sumber daya lokal merupakan kontribusi empiris yang belum ditemukan pada penelitian sebelumnya.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Lomba Kelurahan Berprestasi tingkat Kota Medan Tahun 2025 di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota.

II. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus (*case study*). Pendekatan ini dipilih guna mendapatkan pemahaman yang mendalam, kaya, dan kontekstual mengenai fenomena implementasi kebijakan tanpa melakukan manipulasi statistik terhadap objek di lapangan (Sugiyono, 2022). Sesuai dengan pandangan Simangunsong (2017)dalam buku Metodologi Penelitian Pemerintahan, penelitian pemerintahan berbasis kualitatif diarahkan untuk memahami secara mendalam fenomena empiris serta dinamika pelaksanaan kebijakan, pelayanan publik, dan fungsi pemberdayaan yang dijalankan oleh organisasi perangkat daerah beserta jajaran pemerintahan di tingkat lokal secara kontekstual. Lokus penelitian ditetapkan secara sengaja di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Data penelitian dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara terstruktur kepada para informan kunci. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* berdasarkan relevansi peran dan keterlibatan langsung dalam proses implementasi kebijakan Lomba Kelurahan Berprestasi. Informan kunci meliputi Camat Medan Kota dan Sekretaris Camat sebagai pihak pengampu kebijakan di tingkat kecamatan, Lurah Teladan Barat dan Sekretaris Lurah sebagai aktor utama pelaksana kebijakan, 13 Kepala Lingkungan sebagai motor penggerak inovasi kewilayahan, serta kader organisasi kemasyarakatan setempat sebagai representasi partisipasi masyarakat. Selain itu, dilakukan pula observasi terstruktur langsung terhadap aktivitas pelayanan dan inovasi lokal di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen hukum seperti SK Wali Kota Medan Nomor 100/21.K Tahun 2025 dan profil kelurahan.

Pengujian keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Selanjutnya, seluruh data yang dihimpun dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles et al. (2014) melalui empat tahapan utama: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi akhir. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, selama kurang lebih dua bulan pada tahun 2025, yang mencakup proses observasi awal, pelaksanaan wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumentasi kegiatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data komprehensif yang diuji melalui empat variabel utama dalam model implementasi Edwards III dalam Sururi et al. (2023) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Lomba Kelurahan

Berprestasi di Kelurahan Teladan Barat berjalan secara efektif dan optimal. Adapun pembahasan masing-masing variabel dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Komunikasi

Transmisi informasi dan sosialisasi mengenai indikator penilaian Lomba Kelurahan Berprestasi Tahun 2025 di Kelurahan Teladan Barat telah ditransformasikan secara hierarkis, konsisten, dan sangat transparan. Saluran komunikasi formal diwujudkan melalui forum rapat koordinasi berjenjang yang melibatkan unsur kecamatan hingga tingkat Kepala Lingkungan (kepling). Di samping itu, kejelasan informasi dijaga melalui pemanfaatan saluran komunikasi informal berbasis digital (grup *WhatsApp*), sehingga instruksi pembagian tugas, koordinasi administrasi, dan penyelesaian kendala teknis di lapangan dapat direspons secara cepat demi menghindari distorsi informasi. Efektivitas komunikasi ini selaras dengan prinsip Edwards III dalam Sururi et al. (2023), bahwa transmisi informasi yang jelas dan konsisten merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan.

3.2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan ini ditopang kuat oleh ketersediaan sumber daya yang mumpuni. Dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Kelurahan Teladan Barat didukung oleh 8 personel Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpendidikan Sarjana (S1), sehingga mempermudah pengelolaan administrasi berbasis platform digital nasional epdeskel.kemendagri.go.id. Penerapan aplikasi digital "Tebarsidig" di lokus penelitian sejalan dengan peta jalan transformasi tata kelola pemerintahan daerah berbasis pemanfaatan teknologi informasi demi mewujudkan efisiensi birokrasi di era modern (Riswati, 2021). Transformasi digital melalui inovasi pelayanan publik di tingkat kelurahan harus mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat guna menciptakan tata kelola pemerintahan berkelanjutan yang inklusif (Djatmiko et al., 2025).

Kekuatan utama terletak pada kontribusi aktif 13 Kepala Lingkungan yang melahirkan berbagai inovasi kewilayahan, seperti kawasan Lorong Warna-Warni, budidaya ikan lele terintegrasi, Kedai Kejujuran, serta pemanfaatan lahan Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Berbagai inovasi kewilayahan yang digagas oleh para Kepala Lingkungan di Kelurahan Teladan Barat mengonfirmasi bahwa inisiatif lokal di tingkat akar rumput mampu berkontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan (Mubarok & Kurnia, 2025).

3.3. Birokrasi

Struktur organisasi pelaksana di Kelurahan Teladan Barat berjalan secara proporsional dan akuntabel sesuai dengan pembagian urusan yang diatur dalam regulasi tata kerja perangkat daerah. Kepatuhan aparatur terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) formal menjadi instrumen determinan dalam menjamin kelancaran implementasi kebijakan pelayanan terpadu di tingkat kewilayahan (Handayani et al., 2021). Efektivitas birokrasi ini diperkuat dengan adanya jalinan koordinasi yang solid dan harmonis bersama Tim Penilai Kota Medan yang melibatkan 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektoral, sehingga tahapan penilaian administratif, pemaparan, hingga klarifikasi lapangan berjalan selaras tanpa tumpang tindih kewenangan.

3.4. Disposisi

Sikap, komitmen, dan etos kerja yang ditunjukkan oleh agen pelaksana di Kelurahan Teladan Barat merupakan faktor pembeda utama. Lurah Teladan Barat bertindak proaktif sebagai inovator sekaligus penggerak utama (*main driver*) yang berhasil menanamkan budaya kerja kolaboratif secara konsisten. Pendekatan partisipatif dari komunitas lokal dan kader lingkungan menjadi pilar fundamental dalam menjaga keberlangsungan program pembangunan wilayah yang sadar lingkungan (Syamsiyah et al., 2025). Penilaian aspek kewilayahan dalam lomba kelurahan berprestasi juga mencakup kemampuan integrasi program kesehatan lingkungan ke dalam strategi penguatan ketahanan komunitas (Subarno et al., 2025). Berbagai inovasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat terbukti telah dibangun

dan dijalankan sebagai agenda kerja rutin kelembagaan yang berkelanjutan, bukan sekadar sebuah respons instan atau kepatuhan semu demi menyambut momen perlombaan semata.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini secara umum sejalan dengan penelitian Tawai & Johanis (2025) yang menggunakan model Edwards III dalam Sururi et al. (2023) dalam konteks implementasi program sosial, di mana keempat variabel implementasi bekerja secara sinergis dan saling menguatkan satu sama lain. Sama halnya dengan temuan Setiawan et al. (2022)bahwa kapasitas kelembagaan pemerintah lokal berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik, kapasitas aparatur Kelurahan Teladan Barat yang didukung oleh SDM berpendidikan dan inovasi digital terbukti menjadi prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan.

Berbeda dengan temuan Melinda (2021)yang menemukan banyak kelurahan masih menghadapi kendala teknis berupa minimnya kapasitas SDM dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, Kelurahan Teladan Barat justru berhasil melampaui ekspektasi minimal dengan mengintegrasikan teknologi digital dan inovasi kewilayahan. Temuan ini juga memperkuat penelitian Maharaksa et al. (2025) yang menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam mengatasi hambatan implementasi, di mana koordinasi 19 OPD tim penilai di Kelurahan Teladan Barat berjalan dengan lancar tanpa tumpang tindih kewenangan. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa disposisi kepemimpinan yang proaktif-berkelanjutan merupakan faktor pembeda kritis dalam implementasi kebijakan kompetisi kelurahan, sebuah dimensi yang belum banyak dikaji pada penelitian terdahulu.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan temuan menarik bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di Kelurahan Teladan Barat tidak bersifat artifisial atau temporer, melainkan merupakan cerminan dari budaya kerja kelembagaan yang telah terbangun secara organik sebelum periode lomba berlangsung. Inovasi-inovasi kewilayahan seperti Lorong Warna-Warni, budidaya ikan lele, dan Kedai Kejujuran merupakan program pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan secara rutin. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan Lomba Kelurahan Berprestasi berfungsi optimal bukan sebagai katalis inovasi instant, melainkan sebagai momentum validasi dan apresiasi atas tata kelola yang memang sudah baik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Medan Tahun 2025 di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, telah berjalan dengan sangat efektif dan optimal. Keberhasilan tata kelola hingga mengantarkan kelurahan ini meraih Juara I tingkat kota didorong oleh pemenuhan seluruh variabel model Edwards III dalam Sururi et al. (2023) secara integratif. Saluran komunikasi yang hierarkis dan bebas distorsi, ketersediaan SDM aparatur yang kompeten dengan sokongan inovasi digital "Tebarsidig" dan 13 inovasi kepling, kepatuhan struktur birokrasi terhadap SOP formal, serta disposisi kepemimpinan lurah yang proaktif-berkelanjutan menjadi pilar utama keberhasilan pelaksanaan kebijakan evaluasi perkembangan wilayah ini.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama berupa cakupan lokus yang terbatas pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus tunggal, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, keterbatasan waktu pengumpulan data menyebabkan dinamika implementasi pasca-penilaian lomba belum dapat dikaji secara mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan mengkaji implementasi kebijakan Lomba Kelurahan Berprestasi di beberapa kelurahan secara komparatif untuk menemukan faktor-faktor penentu keberhasilan yang bersifat lebih generalisabel. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi keberlanjutan inovasi kewilayahan pascalomba dalam jangka panjang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Lurah Teladan Barat beserta seluruh jajaran aparatur Kelurahan Teladan Barat dan Kecamatan Medan Kota yang telah memberikan kesempatan, waktu, dan informasi yang sangat berharga kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Terima kasih pula kepada seluruh Kepala Lingkungan dan kader organisasi kemasyarakatan setempat yang telah bersedia menjadi informan penelitian serta seluruh pihak yang membantu dan mendukung terlaksananya penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (ed.)). CV Jejak.

Djatmiko, G. H., Sinaga, O., & Pawirosumarto, S. (2025). Digital Transformation and Social Inclusion in Public Services : A Qualitative Analysis of E-Government Adoption for Marginalized Communities in Sustainable Governance. *Sustainability,* 17(7), 2908. https://doi.org/10.3390/su17072908

Handayani, N., Nurmayanti, R. D., & Nugroho, R. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 4(1), 32–40. https://dx.doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1564

Maharaksa, M. S., Triharjono, H. D., Fadilah, F, N., Solihat, S, A, K., Firda, S, M., & Hidayat, Z, A. (2025).). Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh studi kasus. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 1(6), 69–73.* https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/320

Masbiran, V, U, K., Murliasari, R., Afriyanni., & Wulandari, S, N. (2021). Constraint and Strategies Element for Increasing Effectiveness Village Fund Management Based Interpretive Structural Modelling. *Jurnal Bina Praja, 13(3), 445–457.*https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.445-457

Melinda, Y. (2021). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak). *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.* http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/52838

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Mubarok, F. K., & Kurnia, A, S. (2025). Rural Innovations in Action: Implementing Sustainable Development Goals at the Village Level. I*nternational Journal of Islamic Finance and Sustainable Development, 17(2), 28–49*. https://doi.org/10.55188/ijifsd.v17i2.942

Riswati. (2021). Implementasi tata kelola pemerintahan daerah berbasis digitalisasi teknologi di indonesia. *Jurnal Media Birokrasi.* 3, 1–15.https://doi.org/10.33701/jmb.v3i2.2474

Setiawan, A., Tjiptoherijanto, P., Mahi, B. R., & Khoirunurrofik, K. (2022). The Impact of Local Government Capacity on Public Service Delivery : Lessons Learned from Decentralized Indonesia. *Economies.* 1–13. https://doi.org/10.3390/economies10120323

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Penerbit Alfabeta.

Subarno, A., Koesuma, S., & Sukatiman. (2025). Integrating Environmental Health Into Disaster-Resilient Villages: Strategies, Challenges, And Solutions In Surakarta. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 17(1), 60–68. https://doi.org/10.20473/jkl.v17i1.2025.60-68

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta.

Sururi, M.P., Hafidh, Z., & Afifah, D. A. (2023). *Analisis Kebijakan Sekolah Penggerak: Tinjauan Teoretis dan Model Implementasi Kebijakan Edwards III*. Indonesia Emas Group.

Syamsiyah, N., Sadeli, A. H., Saidah, Z., & Noor, T. I. (2025). Community Participation in the Development of Sustainable , Environmentally Conscious Villages in the Cirasea. Community

Participation in the Development of Sustainable , Environmentally Conscious Villages in the Cirasea Sub-Watershed. *Sustainability, 17(11), 4871*. https://doi.org/10.3390/su17114871

Tawai, A., & Johanis, A. P. (2025). Implementasi Kebijakan : Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Model Edward III. *PAMARENDA : Public Administration and Government Journal, 4(3), 479–491*. https://pamarenda.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/83

